

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah yang paling diresahkan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masih dihadapkan dengan kemiskinan. Banyak sekali teori-teori yang menyebabkan kemiskinan serta memberikan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Kemiskinan bukan hanya menjadi sebuah masalah ekonomi saja tetapi juga menjadi masalah dari berbagai aspek seperti aspek sosial, kesehatan, dan juga aspek pendidikan. Untuk itu kemiskinan menjadi sebuah fokus untuk diberantas. Pertumbuhan ekonomi memang menjadi indikator utama dalam melihat apakah suatu daerah/bangsa/negara mencapai suatu tingkat pertumbuhan. Namun yang sering terjadi adalah tetap adanya kemiskinan di dalam suatu kemakmuran bahkan telah menjadi suatu isu sampai kepada saat sekarang ini. Indra Maipita dalam bukunya yang berjudul “Memahami dan Mengukur Kemiskinan”, mengatakan bahwa, *“Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang juga berarti mengurangi kemiskinan”*. (Maipita : 2023).

Faktor-Faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan adalah modal sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik produktif (*physical productive*), status pekerjaan dan karakteristik desa. Secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Semakin rendahnya mutu dan kualitas penduduk hidup miskin akan memicu rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang secara

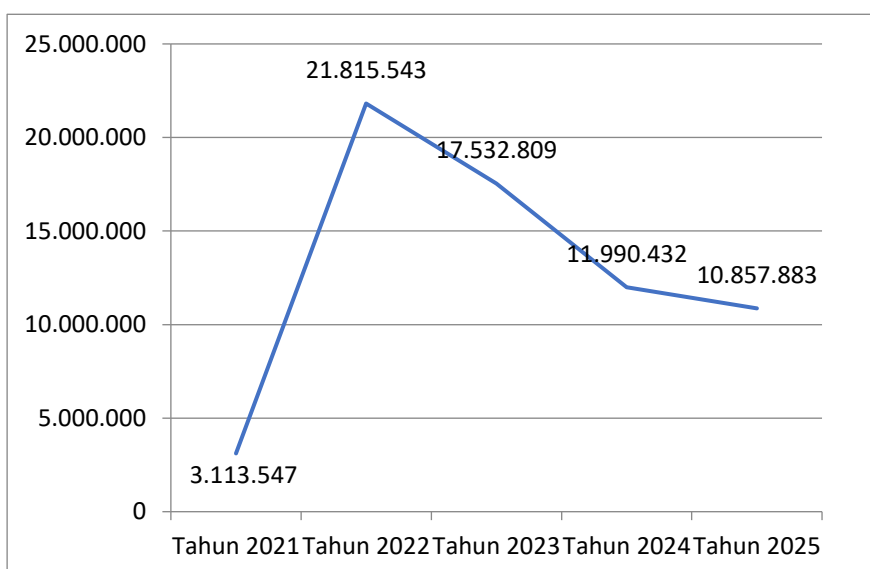
langsung akan berdampak pada melemahnya produktivitas penduduk tersebut. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia, tidak terkecuali di tingkat perdesaan. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional berfluktuasi, distribusi pendapatan yang belum merata mengakibatkan kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin semakin melebar. Desa, yang seharusnya menjadi basis ekonomi kerakyatan, seringkali justru menanggung beban ketimpangan yang tinggi akibat keterbatasan akses infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kesempatan kerja. Di Indonesia, kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat mampu dan masyarakat rentan di tingkat perdesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Fenomena ini diperparah oleh terbatasnya lapangan kerja sektor formal dan rendahnya akses modal usaha di desa. Oleh karena itu, diperlukan intervensi nyata melalui jaring pengaman sosial guna menjaga daya beli masyarakat rentan sekaligus menekan angka ketimpangan ekonomi agar tidak semakin melebar. (Todaro & Smith, 2020).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan global yang hingga kini belum bisa diselesaikan bangsa Indonesia. Tantangan kemiskinan juga sedang dihadapkan pada pembangunan nasional dalam meningkatkan perekonomian dan menata kehidupan rakyat. Sementara kesejahteraan merupakan hak masyarakat yang harus diberikan oleh Pemerintah, khususnya Kabupaten Tuban yang diproyeksikan sebagai lumbung emas perekonomian Provinsi Jawa Timur karena menjadi daerah dengan investasi skala nasional dan internasional mengalami kondisi yang kontradiktif. Terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat dari lapisan sosial ekonomi yang berbeda di beberapa desa di

Kabupaten Tuban menjadi indikasi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial yang perlu ditangani.

Kemiskinan di provinsi Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rentang waktu 5 tahun mengalami penurunan, walaupun ditahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dari data kemiskinan tahun 2021. Namun setelah tahun 2022 data kemiskinan di provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan. Berikut diagram garis data kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.1. Data Kemiskinan Jawa timur 2025



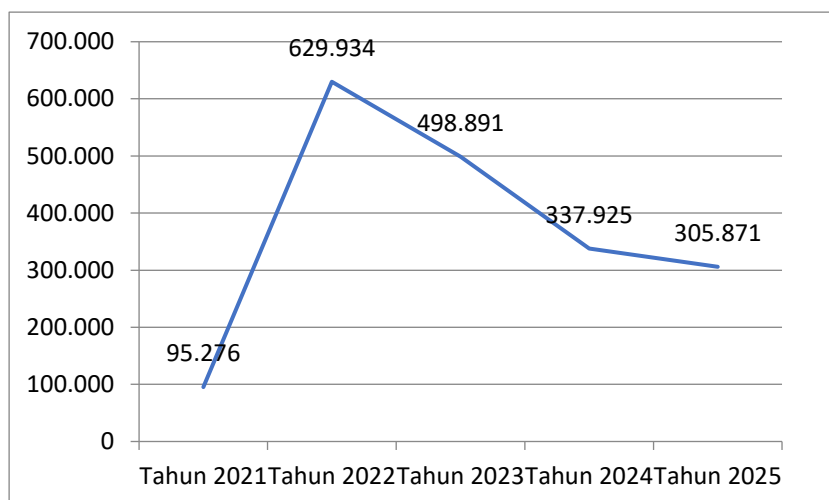
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (2025)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia mengarahkan Rapat Kabinet Terbatas mengenai Keuangan Inklusif pada 26 April 2016. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 yang mengatur tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, di mana pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan

perbankan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini, strategi tersebut diimplementasikan melalui penyaluran program bantuan sosial secara non tunai kepada penerima manfaat.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung (Permensos Nomor 20 Tahun 2019). Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara non tunai. Transformasi program perlindungan sosial dari subsidi pangan menjadi bantuan non tunai (BPNT) memberikan keleluasaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memilih kebutuhan pangan berkualitas guna menekan ketimpangan nutrisi (Hastuti et al., 2019).

Kabupaten Tuban sendiri, hingga tahun 2025, masih dihadapkan pada isu pengentasan kemiskinan yang serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2025, Kabupaten Tuban menempati peringkat kelima termiskin di Jawa Timur dengan tingkat penduduk miskin mencapai 14,13 persen. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengefektifkan berbagai intervensi kebijakan, salah satunya melalui program bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.2. Data Kemiskinan Kabupaten Tuban 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban Jawa Timur (2025)

Kemiskinan dikabupaten Tuban dalam rentang 5 tahun cenderung mengalami penurunan yang signifikan, walaupun ditahun 2022 kemiskinan dikabupaten Tuban mengalami peningkatan yang signifikan daripada tahun 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tuban Maret tahun 2025 tertinggi kelima di Jawa Timur, yaitu sebesar 1,89. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Timur yang sebesar 1,41. Pada periode Maret tahun 2024 hingga Maret tahun 2025, Kabupaten Tuban mengalami penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sangat kecil sebesar 0,06 poin, menyebabkan Kabupaten Tuban menempati posisi ke empat perubahan Kedalaman Kemiskinan (P1) terkecil di Jawa Timur.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tuban Maret tahun 2025 tertinggi ke empat di Jawa Timur, yaitu sebesar 0,42. Sama seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), angka ini juga di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Timur yang sebesar 0,29. Pada periode Maret tahun 2024 hingga Maret tahun 2025, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tuban

mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dari 0,39 pada Maret tahun 2024 menjadi 0,42 pada Maret tahun 2025.

Tingginya kasus kemiskinan menandakan bahwa kehidupan masyarakat yang masih kurang dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga dapat mencerminkan suatu tingkat kesejahteraan, dimana semakin tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan semakin rendah pula tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Dewasa ini masih banyak dijumpai masyarakat yang memiliki standar kehidupan yang kurang layak dan belum tersentuh pada kategori sejahtera. Padahal salah satu tujuan dan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia adalah kesejahteraan. Namun, fakta sosial yang ada menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih menjadi problematika yang masih berkembang sampai sekarang ini. Kesejahteraan selain mendorong kesamaan sosial dalam masyarakat dan mengurangi 3 kesenjangan sosial juga akan menurunkan tingkat kemiskinan sebagai implikasi secara langsung serta yang paling penting adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat (Nurma Mustika, Nurhadji Nugraha, 2019).

Melihat fenomena permasalahan yang terjadi pemerintah dipandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan atau program - program yang dapat menekan angka kemiskinan yang juga sekaligus dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Banyak program dari pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan salah satunya yaitu melalui perlindungan sosial bagi rakyat miskin. Kegiatan perlindungan sosial tersebut adalah bantuan PKH, dimana Program Keluarga Harapan (PKH) ini manifestasi dari kebijakan pengurangan kemiskinan, oleh karena itu kemiskinan menjadi salah satu masalah dimana seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk juga dalam bidang

pendidikan dan layanan kesehatan. Bidang pendidikan dan layanan kesehatan faktor paling penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan terwujudnya kesehatan dan pendidikan yang baik, maka masyarakat dapat menunjang keberhasilan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) dikelola oleh Kementerian Sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial, PKH mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dengan No.32/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim pengendali Program Keluarga Harapan. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran dan pengaduan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan tunai bersyarat terbukti mampu mendorong investasi jangka panjang pada sektor pendidikan dan kesehatan anak-anak dari keluarga miskin (Kementerian Sosial RI, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari segi komponen kesehatan adalah keluarga miskin yang mempunyai anak balita dan ibu hamil. Sedangkan komponen pendidikan dari keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah dari usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan dari komponen kesejahteraan sosial keluarga miskin yang memiliki lanjutan usia (lansia) dan penyandang disabilitas berat. Jadi penerima bantuan akan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan syarat

peserta memenuhi kewajibannya yaitu memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita. Bagi anak usia sekolah harus memenuhi kehadiran minimal 85% kehadiran dikelas. Kemudian untuk kesejahteraan sosial yaitu lansia dan penyandang disabilitas berat wajib melakukan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas dan mengikuti kegiatan sosial.

Kabupaten Tuban memiliki 20 kecamatan, salah satunya kecamatan Plumpang yang terletak ditimur selatan dan langsung berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro yang dipisah oleh sungai Bengawan Solo. Kecamatan Plumpang memiliki jumlah 18 desa yang salah satunya desa Sembungrejo. Pada tahun 2025 Jumlah kemiskinan dikecamatan Plumpang mencapai 12699 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 25798 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selama 5 tahun dari tahun 2021 hingga 2025 jumlah Kepala Keluarga (KK) diseluruh desa di Kecamatan Plumpang mengalami peningkatan yang tidak terlalu banyak. Sehingga penerima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga mengalami peningkatan yang signifikan diseluruh desa dikecamatan Plumpang. Tahun 2021 penerima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 8593 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu ditahun 2022 penerima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meningkat 16% dari tahun 2021 sehingga berjumlah 9952 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian di tahun 2023 penerima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meningkat 11% dari tahun 2022 sehingga berjumlah 11056 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahun 2024 penerima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meningkat 7% dari tahun 2023 sehingga berjumlah 11820 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sama seperti 2024, di tahun 2025 penerima bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga meningkat 7% dari tahun 2024 sehingga berjumlah 12699 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tabel 1.1. Data Jumlah Kepala Keluarga (KK) Seluruh Desa di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2021-2025

NAMA DESA	2021	2022	2023	2024	2025
Bandungrejo	1275	1281	1287	1294	1301
Cangkring	973	980	985	991	997
Jatimulyo	1145	1151	1148	1154	1159
Kebomlati	1357	1364	1370	1375	1379
Kedungrojo	1257	1302	1310	1317	1321
Kedungsoko	1427	1455	1464	1471	1480
Kepohagung	1144	1176	1182	1188	1195
Kesamben	1158	1209	1214	1220	1227
Klotok	1881	1930	1937	1945	1953
Magersari	1635	1679	1685	1693	1702
Ngrayung	960	1023	1027	1033	1038
Plandirejo	1029	1073	1078	1085	1090
Plumpang	1923	1975	1981	1990	1995
Penidon	1700	1708	1716	1724	1730
Sembungrejo	1498	1505	1511	1517	1523
Sumberagung	1792	1798	1804	1814	1822
Sumurjalak	1404	1411	1417	1424	1429
Trutup	1434	1440	1445	1452	1457
TOTAL	24992	25460	25561	25687	25798

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban Jawa Timur (2025)

Berikut adalah penjelasan secara menyeluruh dan terstruktur mengenai data pada tabel di atas:

1. Identitas dan Ruang Lingkup Data:

- Subjek Data: Jumlah Kepala Keluarga (KK).
- Cakupan Wilayah: Seluruh desa di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (terdiri dari 18 desa).
- Rentang Waktu: 5 tahun, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025.
- Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban

2. Analisis Pertumbuhan Secara Makro (Kecamatan)

Secara keseluruhan, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten setiap tahunnya:

- Tahun 2021: 24.992 Kepala Keluarga (KK)
- Tahun 2022: 25.460 Kepala Keluarga (KK) meningkat 468 KK
- Tahun 2023: 25.561 Kepala Keluarga (KK) meningkat 101 KK
- Tahun 2024: 25.687 Kepala Keluarga (KK) meningkat 126 KK
- Tahun 2025: 25.798 Kepala Keluarga (KK) meningkat 111 KK

Dalam kurun waktu 5 tahun, total peningkatan beban administratif Kepala Keluarga (KK) baru di kecamatan Plumpang adalah 806 Kepala Keluarga (KK). Lonjakan terbesar terjadi pada transisi tahun 2021 ke 2022.

3. Klasifikasi Desa Berdasarkan Kepadatan Keluarga (Tahun 2025)

Untuk mempermudah pemetaan wilayah, membagi 18 desa ini ke dalam 3 kategori berdasarkan ukuran jumlah Kepala Keluarga (KK) pada tahun proyeksi 2025:

1) Desa Skala Besar (Lebih dari 1.700 KK)

Desa-desa ini merupakan pusat populasi utama di Kecamatan Plumpang yang membutuhkan perhatian lebih tinggi dalam distribusi pelayanan publik:

- Plumpang: 1.995 Kepala Keluarga (KK) (Terbesar)
- Klotok: 1.953 Kepala Keluarga (KK)
- Sumberagung: 1.822 Kepala Keluarga (KK)
- Penidon: 1.730 Kepala Keluarga (KK)
- Magersari: 1.702 Kepala Keluarga (KK)

2) Desa Skala Menengah (1.200 – 1.700 KK)

Kelompok desa ini memiliki sebaran jumlah Kepala Keluarga (KK) yang cukup merata dan stabil:

- Sembungrejo 1.523 Kepala Keluarga (KK)
- Kedungsoko 1.480 Kepala Keluarga (KK)
- Trutup 1.457 Kepala Keluarga (KK)
- Sumurjalak 1.429 Kepala Keluarga (KK)
- Kebomlati 1.379 Kepala Keluarga (KK)
- Kedungrojo 1.321 Kepala Keluarga (KK)
- Bandungrejo 1.301 Kepala Keluarga (KK)
- Kesamben 1.227 Kepala Keluarga (KK).

3) Desa Skala Kecil (Di bawah 1.200 KK)

Desa-desa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) paling sedikit, yang cenderung lebih mudah dalam koordinasi administrasi tingkat bawah:

- Kepohagung: 1.195 Kepala Keluarga (KK)
- Jatimulyo: 1.159 Kepala Keluarga (KK)

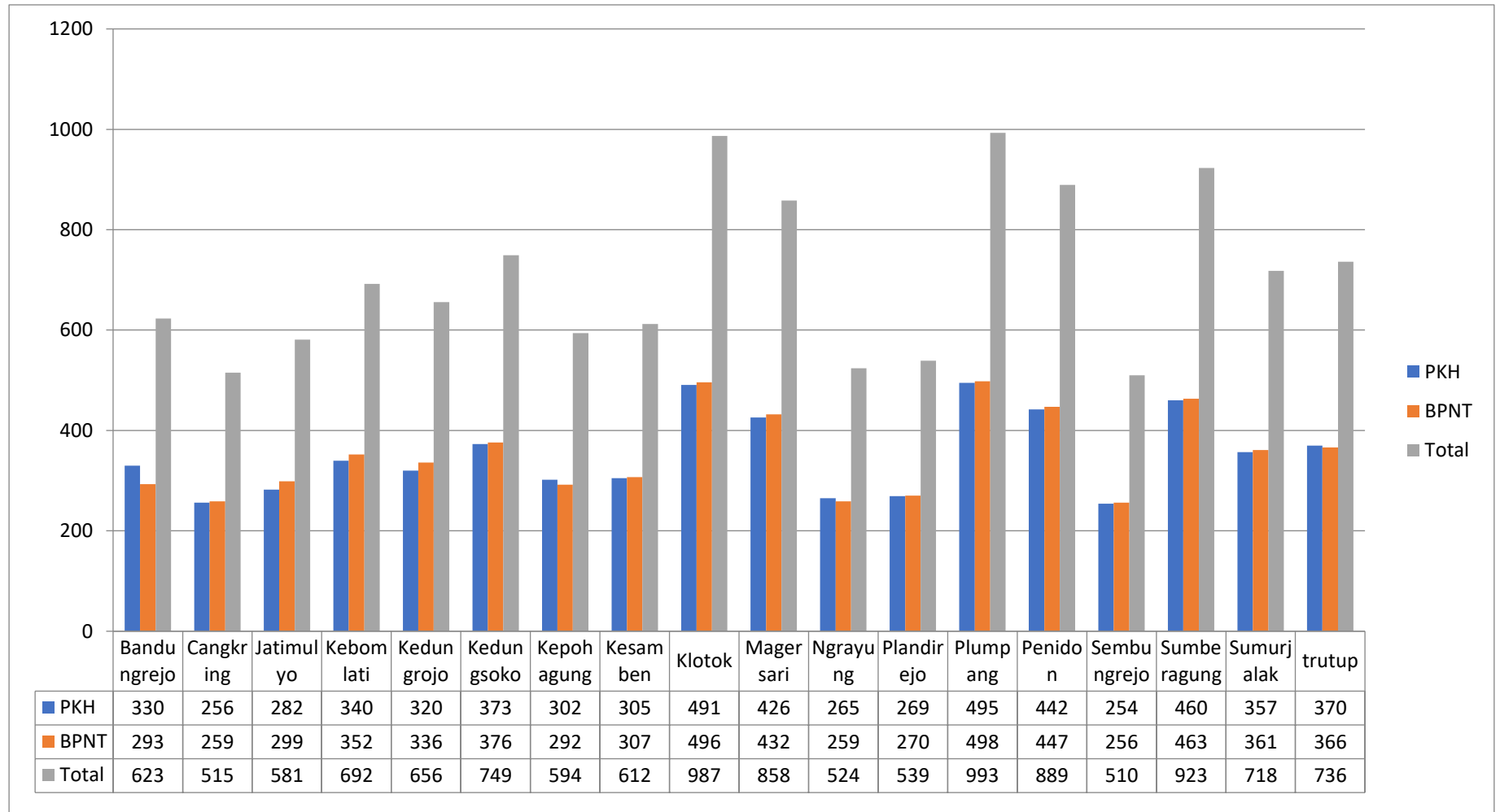
- Plandirejo: 1.090 Kepala Keluarga (KK)
- Ngrayung: 1.038 Kepala Keluarga (KK)
- Cangkring: 997 Kepala Keluarga (KK) (Tersedikit).

4. Relevansi dan Manfaat Data

Data jumlah Kepala Keluarga (KK) per desa ini sangat krusial bagi pemerintah daerah maupun akademisi untuk:

- 1) Perencanaan Anggaran: Menentukan alokasi Dana Desa (DD) atau bantuan sosial agar tepat sasaran sesuai proporsi keluarga.
- 2) Pembangunan Infrastruktur: Menghitung proyeksi kebutuhan fasilitas umum dasar seperti jangkauan listrik, pengelolaan sampah domestik, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas kesehatan (Puskesmas Pembantu).
- 3) Mitigasi Bencana: Mengetahui kapasitas wilayah dalam hal evakuasi dan kesiapan logistik berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) per desa.

Gambar 1.3. Data Penerima Bantuan Sosial (PKH & BPNT) Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban (2025)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban Jawa Timur (2025)

Dari tabel dan gambar diatas, di tahun 2025 penerima bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tiap desa sekecamatan Plumpang berbeda-beda jumlahnya. Desa Plumpang mencatatkan jumlah penerima bantuan tertinggi dari desa lain dengan total 993 penerima, kemudian diikuti Desa Klotok dan Desa Sumberagung yang masing-masing 987 dan 923 penerima bansos. Sebaliknya, Desa Sembungrejo memiliki jumlah penerima bantuan paling sedikit dibandingkan desa lainnya, yaitu sebanyak 510 penerima. Data diatas menunjukkan distribusi bantuan sosial yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan Plumpang untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

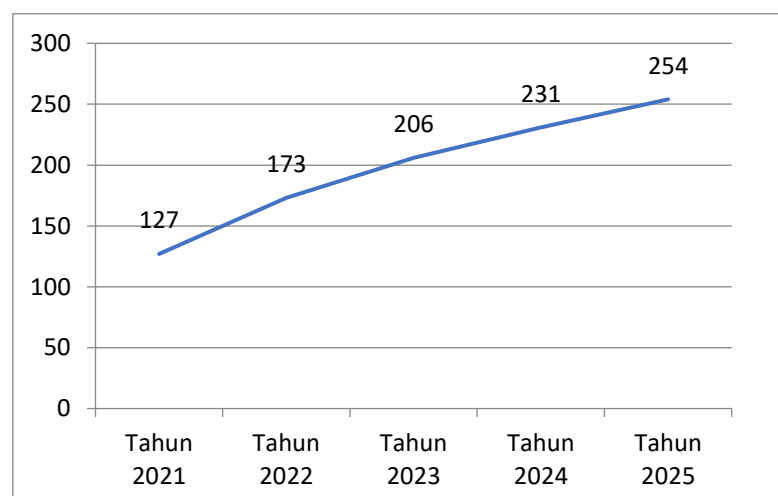
Lima desa teratas yaitu Plumpang, Klotok, Sumberagung, Penidon, dan Magersari menyumbang sekitar 36,6% dari total penerima bantuan di seluruh kecamatan. Ini menunjukkan konsentrasi kebutuhan bantuan yang cukup tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan Desa Sembungrejo hanya menyumbang sekitar 4,02% (terendah sekecamatan). Perbedaan antara jumlah penerima PKH (6337) dan BPNT (6362) sangat tipis, hanya selisih 25 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kecamatan ini kemungkinan besar menerima kedua jenis bantuan tersebut secara bersamaan.

Sedangkan Desa Sembungrejo yang merupakan lokasi penelitian memiliki jumlah 510 penerima bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan rincian 254 penerima PKH dan 256 penerima BPNT. Dalam rentang waktu 5 tahun data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sembungrejo kecamatan Plumpang kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2021 terdapat 127

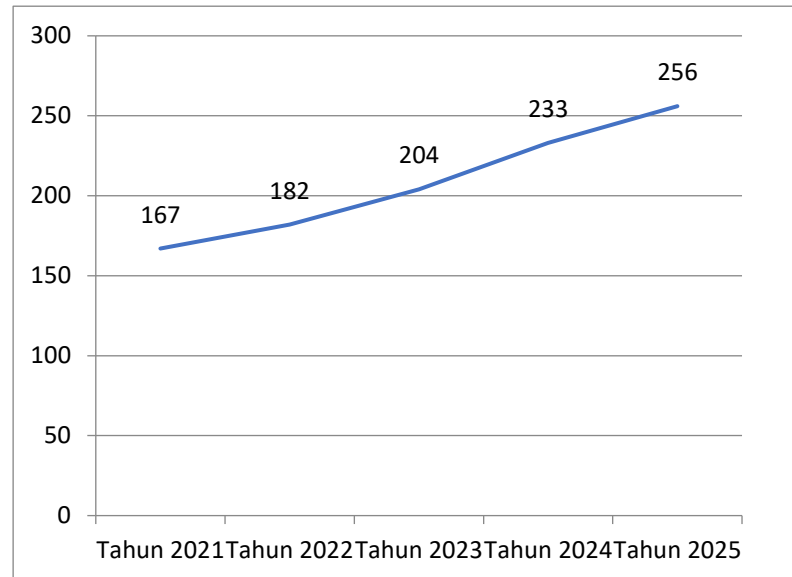
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lalu meningkat 36,22% ditahun 2022 menjadi 173 KPM. Dari tahun 2022 ke 2023 penerima PKH meningkat 19,08%. Sedangkan di Tahun 2023 penerima PKH berjumlah 206 dan meningkat 12,14% ditahun 2024 yaitu berjumlah 231 penerima, lalu meningkat 9,96% ditahun 2025 menjadi 254 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Sembungrejo kecamatan Plumpang kabupaten Tuban juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam rentang waktu 5 tahun. Tahun 2021 terdapat 167 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lalu meningkat 8,98 % ditahun 2022 menjadi 182 KPM. Dari tahun 2022 ke 2023 penerima BPNT meningkat 12,09%. Sedangkan di Tahun 2023 penerima BPNT berjumlah 204 dan meningkat 14,22% ditahun 2024 yaitu berjumlah 233 penerima, lalu meningkat 9,87% ditahun 2025 menjadi 256 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut gambar diagram garis tentang kenaikan penerima bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama 5 tahun (2021 – 2025).

Gambar 1.4. Data Penerima PKH Desa Sembungrejo 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban Jawa Timur (2025)

Gambar 1.5. Data Penerima BPNT Desa Sembungrejo 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban Jawa Timur (2025)

Dari penjelasan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam waktu 5 tahun mulai dari 2021 hingga 2025 data penerima bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami kenaikan yang terus menerus. Memang beberapa dari penerima tergolong keluarga yang miskin, namun banyak diantaranya ada penerima PKH dan BPNT yang tergolong mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan jika tidak mendapat bantuan PKH dan BPNT penerima yang mampu tersebut tidak berefek pada ekonomi mereka.

Pemerintah mengharapkan penggunaan dana bantuan PKH dan BPNT dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, menunjang pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan peningkatan ekonomi keluarga. Namun faktanya, berdasarkan temuan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, mayoritas penerima manfaat PKH adalah perokok aktif. Sehingga ditemukan beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang membelanjakan bantuan

untuk membeli rokok. Dengan hasil temuan tersebut, kemungkinan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru mengalir untuk pembelian rokok. Padahal seharusnya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) wajib dimanfaatkan dengan tepat agar sesuai dengan harapan program.

Walaupun data menunjukkan peningkatan pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam kurun waktu 5 tahun, akan tetapi masih terdapat beberapa keluarga yang rentan miskin dan kurang mampu justru belum memperoleh manfaat daripada bantuan sosial baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sehingga hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi didesa Sembungrejo.

Keluarga yang mampu dan memperoleh manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan semakin kaya, namun keluarga rentan miskin yang belum atau tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan semakin miskin ekstrim, begitulah ketimpangan ekonomi didesa Sembungrejo. Oleh Karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten TubanProvinsi Jawa Timur Tahun 2025”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) Berpengaruh Di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Tahun 2025?
2. Apakah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berpengaruh Di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Tahun 2025?
3. Apakah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berpengaruh Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Tahun 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Desa Sembungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik dari dimensi keilmuan (teoritis) maupun dimensi terapan (praktis). Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Manfaat Teoritis:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan:

Memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sosiologi ekonomi atau kebijakan publik, khususnya mengenai efektivitas program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di tingkat desa.

2. Referensi Akademik:

Menjadi referensi atau bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama terkait dinamika pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah pedesaan.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah Desa Sembungrejo & Kecamatan Plumpang:

Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk memahami kendala riil di lapangan, sehingga penyaluran dan pendampingan PKH serta BPNT ke depannya bisa lebih tepat sasaran.

2. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Tuban:

Memberikan gambaran data dan fakta objektif mengenai sejauh mana PKH dan BPNT mampu menekan angka ketimpangan ekonomi di level akar rumput (desa) pada tahun 2025-2026.

3. Bagi Pendamping PKH dan BPNT:

Menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas bimbingan atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih mandiri secara ekonomi.

4. Bagi Penulis:

Menambah wawasan mendalam mengenai realitas kemiskinan dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan ekonomi di daerah asal.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dikemukakan secara eksplisit agar pembaca dapat memahami ruang lingkup dan keterbatasan generalisasi hasil penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Batasan Wilayah (Spasial)

Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup geografis Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Artinya, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi atau dianggap mewakili kondisi desa lain atau kabupaten lain secara keseluruhan.

2. Batasan Waktu (Temporal)

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program dan kondisi ekonomi pada tahun 2025. Data yang digunakan, baik data jumlah penerima bantuan maupun data indikator ekonomi, terbatas pada periode waktu tersebut.

3. Batasan Variabel (Substansial)

- Variabel Bebas: Hanya dibatasi pada dua program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT). Faktor bantuan lain (seperti BLT-DD atau bantuan UMKM) tidak dibahas dalam penelitian ini.

- Variabel Terikat: Fokus pada Ketimpangan Ekonomi masyarakat di Desa Sembungrejo. Dampak sosial lainnya seperti tingkat kesehatan atau pendidikan tidak dibahas secara mendalam kecuali yang berkaitan langsung dengan indikator ekonomi.

4. Batasan Subjek/Responden

Penelitian ini terbatas pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar secara resmi sebagai penerima PKH dan BPNT di Desa Sembungrejo. Berdasarkan data yang Anda miliki sebelumnya, terdapat 254 penerima PKH dan 256 penerima BPNT di desa tersebut (total 510 penerima bantuan).

5. Batasan Metode

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. Penelitian ini hanya mencari hubungan sebab-akibat (pengaruh) secara statistik dan tidak membahas proses birokrasi atau mekanisme penyaluran bantuan secara mendalam.